

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sosialisasi Nilai-Nilai Politik dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik di Pesantren Fauzan” yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi serta mengacu pada referensi pendapat dari beberapa pakar atau ahli yang relevan, maka kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pesantren Fauzan yang merupakan bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik memandang bahwa politik itu sangat penting untuk dipelajari. Dalam hal ini pesantren mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist yang mengisyaratkan pentingnya hidup berdampingan mengikuti irama pemerintahan yang berjalan (*Ulil Amri*), karena bagaimana pun pesantren adalah bagian dari potensi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam upaya transformasi nilai kepada masyarakat. Namun nilai-nilai politik yang ditanamkan di Pesantren Fauzan dalam proses sosialisasi adalah nilai-nilai yang didasari dengan pembinaan moral dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam segala hal, baik dalam kapasitasnya sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan dalam kapasitasnya sebagai insan politik.
2. Bentuk sosialisasi yang diterapkan di Pesantren Fauzan yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Dilihat dari segi proses penyampaiannya, Pesantren Fauzan lebih cenderung melakukan sosialisasi yang sifatnya

langsung berupa pemberian penyuluhan, penjelasan, ajakan, arahan politik yang akan membangun Negara. Adapun penerapannya yaitu melalui pengajian yang diadakan rutin oleh pesantren, baik melalui pengajian mingguan maupun bulanan. Tujuan yang ingin dicapai dari bentuk sosialisasi yang diterapkan tersebut yaitu dalam rangka mensejahterakan umat, mengabdikan kepada umat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan dalam bidang lainnya.

3. Metode yang diterapkan Pesantren Fauzan berkaitan dengan sosialisasi yang diterapkan yaitu dengan menggunakan metode akhlakul karimah (suritauladan), pendekatan personal, ceramah dan dialog (musyawarah). Namun pada dasarnya pesantren tidak mengkhususkan penggunaan metode tertentu dengan tujuan agar santri ataupun masyarakat memahami nilai-nilai politik. Meskipun begitu, beberapa metode tersebut disesuaikan dengan budaya kepesantrenan. Adapun metode sosialisasi yang paling efektif memberikan pengaruh terhadap pemahaman pendidikan politik para santri dan masyarakat yaitu metode ceramah dengan suritauladan.
4. Indoktrinasi yang seringkali mewarnai proses sosialisasi nilai-nilai politik khususnya di Pesantren Fauzan dalam prosesnya indoktrinasi tersebut memang ada. Namun indoktrinasi yang diterapkan bukan indoktrinasi yang dilandasi atas dasar kepentingan ataupun hal-hal yang sifatnya praktis dan pragmatis, tetapi indoktrinasi yang berkaitan dengan tujuan berpolitik dari pesantren itu sendiri, yaitu untuk mempersatukan umat dalam menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dalam hal ini

pesantren tidak secara tegas memberikan doktrin secara langsung kepada para santri dan masyarakat, akan tetapi kultur yang melembaga ketika pesantren sudah mengambil langkah tertentu, maka otomatis hal itu sudah serta merta dianggap santri-santri ataupun masyarakat sebagai hal yang harus diikuti dan ditaati.

5. Penggunaan media dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik Pesantren Fauzan hanya terbatas pada fasilitas yang ada saja, karena jika melihat bentuk sosialisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan budaya pesantren, urgensi dari media memang tidak terlalu penting. Adapun media atau sarana yang diperlukan pesantren dalam hal ini berupa tempat dan hal-hal lainnya yang menunjang berlangsungnya ceramah sebagai bentuk dari sosialisasi yang biasa dilakukan. Bentuk media yang paling efektif dalam kaitannya dengan proses sosialisasi politik kepada santri ataupun masyarakat yaitu melalui khotbah atau ceramah yang dilaksanakan di *Aula* sebagai sarana dari sosialisasi.
6. Implementasi dari sosialisasi nilai-nilai politik yang di peroleh para santri dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan dalam lingkungan pesantren para santri turut mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, musyawarah dan keorganisasian *rois/roisah* dalam kepemimpinan pesantren. Adapun diluar lingkungan pesantren eksistensi para santri cenderung masih kurang begitu menonjol.

7. Kecenderungan preferensi politik para santri ketika adanya Pemilu (baik Pemilu pada ataupun sejenisnya), hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan preferensi politiknya para santri dan masyarakat senantiasa mengikuti apa yang diarahkan oleh pesantren, sekalipun pesantren tidak mengarahkan ataupun mengajak secara langsung. Dalam hal ini kiai sebagai pimpinan pondok pesantren merupakan figur yang sangat berpengaruh dan berperan di masyarakat dengan segala atribut yang dimilikinya.

B. Rekomendasi

1. Konsistensi pesantren sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik harus selalu peka terhadap dinamika perkembangan yang terjadi dengan tetap tidak mengabaikan peran dan fungsi pesantren yang sesungguhnya, karena itu sosialisasi yang dilakukan harus mengupayakan pendidikan yang berorientasi pada kesadaran politik. Di samping itu, santri harus lebih difasilitasi, sehingga pesantren mampu mencerak santri yang lebih egalitarian, rasional, independen, kritis, inklusif, kredibel dan aktif di masyarakat agar transformasi nilai-nilai budaya pesantren sebagai *grand design culture* untuk mewarnai kehidupan politik masyarakat akan terrefleksi secara realistik (*waqi'iyah*) sesuai ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*.
2. Sistem pendidikan pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang dilakukan agar tetap relevan dan

survive menghadapi perkembangan zaman. Bahkan, lebih lanjut pesantren harus mampu mewujudkan sistem pendidikan sinergik, yakni sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas. Jika strategi ini mampu dilaksanakan, hubungan pendidikan pesantren dengan dunia lain pun akan sinergis.

3. Kiai sebagai pusat kendali (*central figure*) pesantren, harus tetap menjadi benteng aktif yang membina, mendidik, mengayomi, dan mengawal umat dalam proses implementasi nilai-nilai politik yang memiliki entitas ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam dinamika dan atmosfer politik.
4. Santri harus lebih termotivasi untuk belajar memupuk wawasan yang mendalam tentang politik, aktif berorganisasi agar ‘memangkas budaya minder’, sehingga memiliki orientasi yang lebih jelas dan dibuktikan dengan gerakan politik aktif ketika berkiprah dalam kepemimpinan akan mampu menciptakan kultur yang *the man on right place*, baik kepemimpinan dalam masyarakat lokal maupun dalam skala yang lebih luas.
5. Pemerintah harus lebih proaktif dan serius dalam menjaga nilai-nilai kultur pesantren. Hal ini dianggap perlu karena pesantren memiliki kontribusi besar dalam peranan politik memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Adapun caranya dengan meningkatkan harmonisasi hubungan dengan ulama pesantren, serta membuat produk hukum yang spesifik tentang pola pendidikan berbasis kultur pesantren.

6. Partai politik, budayawan, pakar politik dan akademisi yang beragama Islam harus lebih banyak mengkaji kultur pesantren yang merupakan bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik, sehingga hubungan pesantren dengan lembaga lainnya bisa saling memberi masukan dalam upaya membangun masyarakat sesuai dengan kultur ke Indonesia-an.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Affandi, Idrus. (2009). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama
- Alma, Buchori. (2006). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan dan Muhammad. (2001). *Demokratisasi dan Demiliterisasi (Wacana dan Pergulatan Pesantren)*. Jakarta: P3M
- Darmawan, Cecep. (2004). *Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ilmu Politik*. Diklat Kuliah Ilmu Politik.
- Dhofier, Zamakhsari. (1982). *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai)*. Jakarta: LP3S
- Hajar, Ibnu. (2009). *Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Horison, Lisa. (2007). *Metodologi penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bandar Maju
- Jurdi, Fathurrohman. (2009). *Aib Politik Islam*. Yogyakarta : AntonyLib
- Kartini, Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju
- Madjid, Nurcholis. (2007). *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat
- Margono. (2003). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: PT Rineka cipta
- Masyhuri dan Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama

- Moeleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moekry, Mukhotim. (2002). *Pesan-pesan Tercerahkan Untuk Para Ulama*. Jakarta Selatan: Wahyu Press.
- Nafi', Dian. *et al.* (2007). *Praktis Pembelajaran Pesantren*. Institute for Training and Development (ITD): Yogyakarta
- Nahrawi, Amiruddin. (2008). *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta : Gema Media
- Patoni, Achmad. (2007). *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qomar, Mujamil. (2008). *Pesantren (dari transformasi metodologi menuju demokratisasi Institusi)*. Jakarta: Erlangga
- Riduwan. (2006). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Rush dan Althoff. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Susimanto. (2004). *Menelusuri Jejak Pesantren*. Yogyakarta: Alief Press.
- Van Bruinessen, Martin. (1994). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan

2. Skripsi, Jurnal dan Dokumen lainnya

- Andriana, Devi. (2007). *Orientasi Perilaku Politik Santri dalam Budaya Pesantren*. Skripsi Sarjana UPI Bandung. Tidak diterbitkan.
- Hendarawan, Chandra. *et al.* (2006). Model Pendidikan Warga Negara Demokratis. "Peranan Pendidikan Politik dalam Membina Insan Akademis Berprilaku Demokratis". Jurusan PKn FPIPS.
- Mardiana, Rina. (2009). *Pendidikan Politik di Pesantren*. Skripsi Sarjana UPI Bandung. Tidak diterbitkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

